

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT EKONOMI ISLAM

SKRIPSI



Oleh

**MUHAMMAD YAKUB**  
**11525101532**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

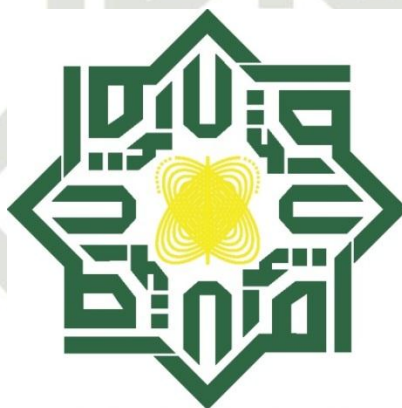
**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**

# ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT EKONOMI ISLAM

## SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi  
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MUHAMMAD YAKUB**  
**11525101532**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa  
Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Ekonomi  
Islam", yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yakub

Nim : 11525101532

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2019

Pembimbing Skripsi

Ahmad Hamdalah ME.Sy





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN  
LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT EKONOMI ISLAM"  
yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Yakub**  
NIM : 11525101532  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 26 November 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu, 04 Desember 2019  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak

Sekretaris  
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I  
Drs. Arifuddin, MA

Penguji II  
Nur Hasanah, S.E, MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
NIP. 19580712 1986031 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Yakub, (2019): Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. Biasanya buruh menerima upah setelah panen padi. namun kenyataannya ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya, upah mereka tidak diberikan tepat pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari setelah hasil panen padi dijual oleh pemilik lahan. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan karna salah satu pihak ada yang dirugikan.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upah buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal, dan bagaimana menurut Ekonomi Islam terhadap upah buruh panen padi Di Desa Roburan Lombang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pemilik lahan dan 32 orang buruh panen padi, seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sistem upah berdasarkan hasil apabila buruh mendapatkan 10 kaleng padi maka setiap buruh mendapatkan 1 kaleng padi dan pemilik lahan mendapatkan 9 kaleng padi. Sedangkan upah harian buruh panen padi tergantung dari pemberiah pemilik lahan. Dalam sistem pengupahan terjadi keterlambatan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran upah

Menurut ekonomi Islam, upah buruh panen padi belum sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu dalam konsep keadilan dan kelayakan sementara dalam konsep kebajikan sudah sesuai dengan ekobnomi Islam.

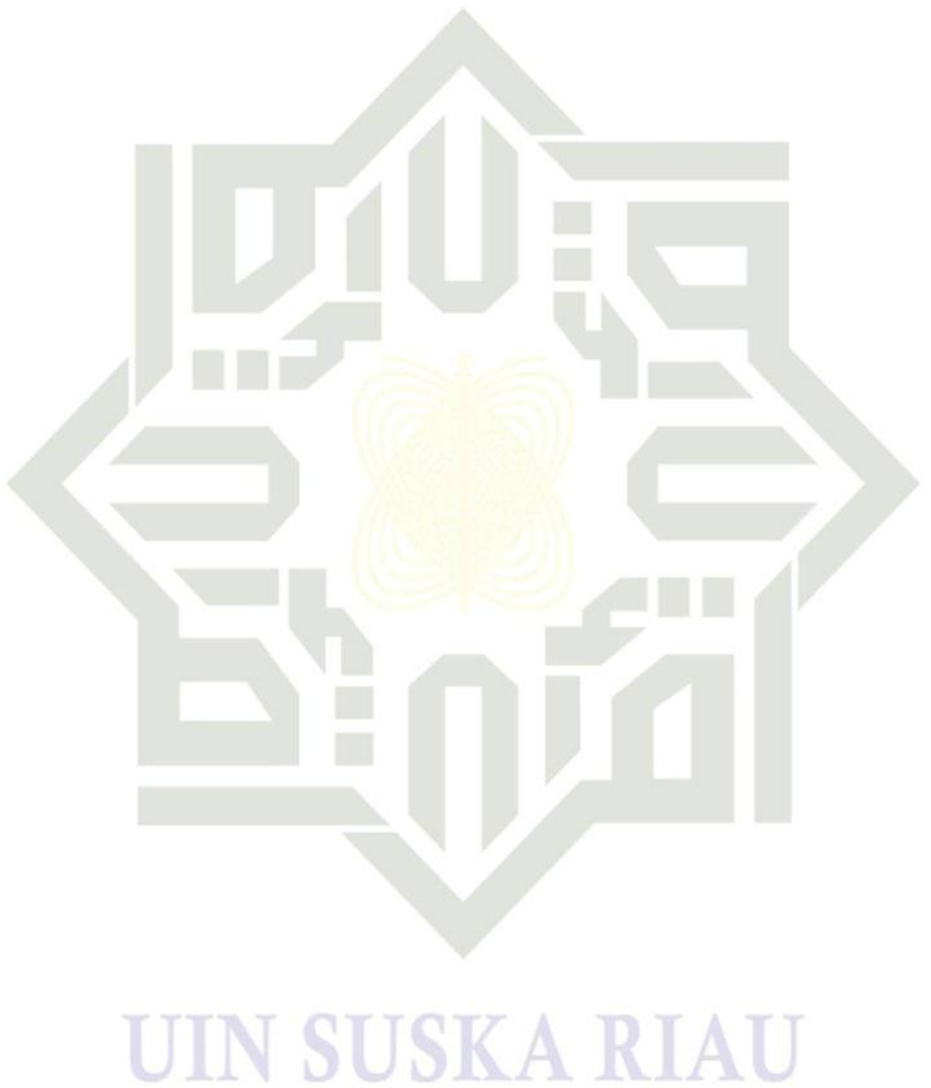
**Kata kunci: Upah, Ekonomi Islam**

**Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah “Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu bantuan yang berbentuk materi dan non materi. Diantaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Suhaimi (Alm) dan Ibunda Amnah (Almh) yang telah membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis hingga penulis bisa mencapai bangku kuliah seperti sekarang ini, walaupun ayahanda dan ibunda tidak bisa berada disamping penulis ketika penulis selesai menyiapkan skripsi ini, tetapi penulis yakin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© bahwa ayahanda dan ibunda bahagia melihat ananda bisa menyelesaikan perkuliahan. Mudah-mudahan ayahanda dan ibunda ditempatkan di jannahnya. Amiin

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag, selaku Ketua Program Studi dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, ME. Sy, selaku Dosen Pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi penulis.
7. Pimpinan perpustakaan UIN Suska yang telah memberikan fasilitas buku-buku dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.



10. Kepada Konco Team kalian teman-teman rasa keluarga yang luar biasa memberikan semangat dan motivasi yang tidak penulis dapatkan dari teman lain..

11. Teman-Teman KKN Koto Tuo Barat, (Sepri, Ijul, firman, Hasanah, Dila, Ika, Mitra, Rere, Nisa, Ira), kalian teman-teman yang luar biasa yang telah memberikan semangat kepada penulis.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan Zulfikri dan Faisal dan sahabat Eksyar C yang telah banyak membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Demikian dari saya selaku penulis skripsi akhir kata penulis ucapkan

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekanbaru 04 November 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Roburan Lombang .....	12
B. Kondisi Geografi dan Demografi Desa .....	13
C. Keadaan Sosial .....	15
D. Kondisi Ekonomi .....	17
E. Struktur Pemerintahan Desa .....	18
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Upah .....	20
B. Pengertian Ijarah .....	26
C. Dasar Hukum Ijarah.....	29
D. Macam-Macam Ijarah.....	31
E. Rukun dan Syarat Ijarah .....	31
F. Sistem Pembayaran Upah .....	35
G. Penutupan Upah Kerja .....	38
H. Pembayaran Upah dan Sewa .....	41
I. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah .....	42
J. Upah Menurut Islam .....	45

**Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

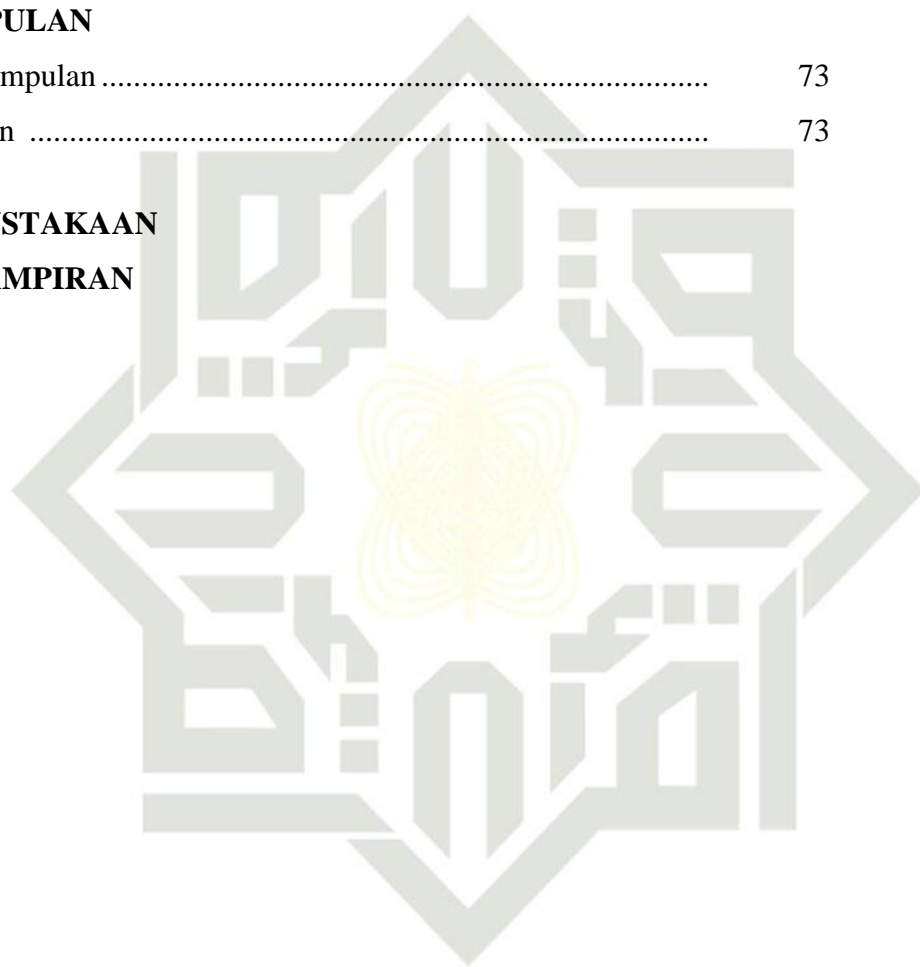
A. Upah Buruh Panen Padi di Desa Robutan Lombang Kabupaten Mandailing Natal .....	51
B. Menurut Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.....	63

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Tabel 2.1	Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Roburan Lombang .....	13
Tabel 2.2	Luas Wilayah .....	14
Tabel 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .	15
Tabel 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2.5	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	16
Tabel 4.1	Tingkat Umur Responden .....	52
Tabel 4.2	Jenis kelamin .....	53
Tabel 4.3	Pendidikan Responden .....	53
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Tentang Perjanjian Pembayaran Upah .....	54
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Tentang Kapan Pemberian Upah Buruh Panen Padi .....	54
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Tentang Sistem Upah Panen Padi .	56
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Tentang Berapa Kaleng Upah Dalam Masa Panen Padi .....	57
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Tentang Jumlah Uang Yang Diterima Selama Panen Padi .....	57
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Tentang Lama Bekerja Pada Masa Panen Padi .....	58
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Tentang Upah Harian Buruh Panen Padi Selama Panen Padi .....	59
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Waktu Dalam Pembayaran Upah .....	59
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemilik Lahan Pernah Menaikkan upah .....	61
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Tentang Pemotongan Upah Oleh Pemilik Lahan .....	61
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Tentang Jasa Yang Diberikan Dengan Upah Yang di Dapatkan .....	62
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Tentang Upah Yang Diterima .....	62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan elemen paling strategis dalam organisasi, harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan produktifitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, sumber daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya. Karna itu memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan dalam keseluruhan upaya peningkatan produktivitas kerja.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa factor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun factor lain, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, teknologi, sarana produksi, manajen dan prestasi.<sup>2</sup>

Di dalam ilmu ekonomi istilah tenaga kerja di singkat dengan *Human Resources*. Didalam istilah *human resources* itu terkumpullah semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa.

Masalah tenaga kerja (buruh) memang suatu masalah yang sangat kompleks dan sangat urgen yang mesti dapat perhatian khusus, karena maju

---

<sup>1</sup> Edi Sutrisno, Manajemen *Sumber Daya Manusia*,(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 99

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 102

mundurnya suatu bisnis (perusahaan) pada khususnya dan perekonomian pada umumnya tidak lepas dari peran para tenaga kerja (sumber tenaga kerja manusia.)

Tenaga kerja muncul karna adanya hubungan antara pemberi kerja dan orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 tentang ketenagakerjaan menerangkan bahwa, pekerja atau buruh adalah orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *ijarah*. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>3</sup>

*Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti) dan *tsawab* (pahala) dan disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara' *ijarah*

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2010), hal. 102



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>4</sup> Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari pada yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga tercipta suatu keadilan diantara mereka. Dalam Al-Qur'an surah Al-Jatsiyah ayat 22, berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.<sup>5</sup> (QS. Al-Jatsiyah: 22)

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi mereka hal ini dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dan sumbangsinya dalam kerjasama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>6</sup>

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pundi Askara, 2006), jilid 4, h. 2003

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), h. 500

<sup>6</sup>Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 361

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan barang itu sendiri.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.<sup>8</sup>

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah bagi para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.<sup>9</sup>

Selain itu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayar upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dan Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering". (Riwayat Ibnu Majah).<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 2, h. 150

<sup>8</sup>Bank Indonesia, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, h. 56

<sup>9</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 113.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h.118

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak dibayarkan.<sup>11</sup>

Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal merupakan desa tempat tinggal penulis yang terdiri dari 455 kepala keluarga dan 100% beragama Islam. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai penghasil pertanian. Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan pertanian melainkan hanya bekerja jika pemilik lahan mengundangnya untuk menanam maupun memanen. Pada saat padi telah menguning artinya tiba waktunya untuk dipanen maka jika pemilik sawah tidak mampu memanen sendiri maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk panen padi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap buruh panen yang ada di lapangan, dimana mereka mengeluh terhadap upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. Berdasarkan kesepakatan kerja bahwa upah buruh panen padi diberikan setelah pekerjaan selesai namun kenyataannya ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya, upah mereka tidak diberikan tepat pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari setelah hasil panen padi dijual oleh pemilik lahan.<sup>12</sup> Hal ini tidak sesuai dengan keadilan karena salah satu pihak ada yang dirugikan.

<sup>11</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, h. 222

<sup>12</sup>Ali Imran, *Buruh Panen Padi*, Wawancara 10-03-2019



Dari latar belakang di atas penulis ingin mengadakan penelitian berupa karya ilmiah dengan judul: **“ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai “Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam”.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana menurut ekonomi Islam terhadap upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui menurut ekonomi Islam terhadap upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bagi Pengupah dan Buruh Panen Padi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumbang pikiran dan informasi tentang perkembangan Ekonomi Islam, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya tentang analisis upah.

## E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek adalah sesuatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji dan diteliti.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah buruh tani panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1905

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Objek adalah layak atau tidak layak suatu masalah diteliti yang didasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya masalah dikonseptualisasikan.<sup>14</sup> Objek dalam penelitian ini adalah upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam.

#### 3. Populasi dan Sampel

Menurut Prof. Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.<sup>15</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan buruh panen padi sebanyak 42 orang yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 32 orang buruh panen padi. Adapun sampel yang diambil yaitu seluruh populasi dengan teknik *total sampling*.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu

<sup>14</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Edisi Kedua, Cet. Ke-5, h. 55

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 49



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda.<sup>16</sup> Data primer penelitian ini dalah buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang di dokumentasikan (buku, gambar).

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini:

##### a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>17</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai..<sup>18</sup>

##### b. Angket

Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada setiap responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

<sup>16</sup>Etjah Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Malang : Penerbit Andi, 2010), h. 171

<sup>17</sup>M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 103.

<sup>18</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.105

## Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>19</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa paparan secara deskriptif setelah mengumpulkan data lapangan baik melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

## 7. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah:

- Deduktif, penulisan mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan.
- Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

## F. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari: sejarah desa, keadaan geografis dan keadaan demografis desa, keadaan sosial desa, dan kondisi ekonomi,

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teoridan Praktek)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) Cet. 1, Ed. 1, h. 177

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur organisasi Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Terdiri dari: pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, sistem pembayaran upah. penutupan upah kerja, pembayaran upah dan sewa, upah dalam pekerjaan ibadah, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, Upah menurut Islam.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tentang upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal, dan tinjauan menurut ekonomi Islam terhadap upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.

**BAB V : PENUTUP**

bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

**KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Roburan Lombang

Kampung/desa Roburan Lombang adalah salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal yang menurut sejarah desa ini berasal dari kampung yang bernama Huta Bolak. Huta artinya kampung/desa, sedangkan Bolak artinya luas, jadi Huta Bolak artinya desa yang luas, Huta bolak dalam perkembangannya disebut juga Huta Bolak Namartua dan kemudian menjadi Desa Roburan Lombang.

Huta Bolak Namartua yang selanjutnya disebut Desa Roburan Lombang ini didirikan oleh Mangaraja Mandailing anak dari Sutan Kumala Sang Hyang di Pertuaan Agung Nadohuk-dohuk di baba pintu langit, ini merupakan keturunan dari Raja Sibaroar gelar Sutan Diaru Nasaktion, pendiri kerajaan Mandailing dengan falsafah Dalihan Natolunya.

Desa Roburan Lombang dan dilanjutkan oleh anak dari Mangaraja Mandailing yang bernama Sutan Kumala Bulan Namartua. Sutan Kumala Bulan Namartua terus mengembangkan desa ini dan dilanjutkan oleh anaknya Papan Batara Guru dan keturunannya. Desa Roburan Lombang sudah berkembang dan melahirkan beberapa desa di Mandailing Natal antara lain: Desa Lumban Dolok, Aek Ngali, Sabajior Julu, Sabajior Jae, Bangkelang, Muara Soma, Ujung Padang (sekarang berganti nama menjadi Parbangunan). Itulah bukti bahwa Desa Roburan Lombang termasuk desa tertua di Kabupaten Mandailing Natal. Desa yang didirikan oleh Mangaraja Mandailing beserta

pengikutnya ini sudah ada dari 500 tahun yang lalu. Jadi sebelum menaklukkan Malaka tahun 1511 Masehi. Masyarakat Desa Roburan Cornelius De Houtman, orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 Masehi di Pelabuhan Banten, desa ini sudah ada ataupun lama sebelum Alfonso D'albuquerque orang Portugis menaklukkan Malaka tahun 1511, masyarakat Desa Roburan Lombang berperadaban yang tinggi.

**Tabel 2.1**  
**Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Roburan Lombang**

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1962-1967	MANSYUR	-
2	1970-1973	DAYAN	-
3	1973-1981	LOKOT	Kades
4	1981-1983	EFENDI	Kades
5	1983-1993	AHMAD PANGUDUT	Kades
6	1993-2002	M. SYARIF HUSEIN	Kades
7	2003-2008	SAHRUL NASUTION	Kades
8	2009-2014	RAHMAD S.Pdi	Kades
9	2014-2016	AHMAD S,Sos	Plt.Kades
10	2017-2022	MUHAMMAD IDRIS	Kades

Sumber data primer Kantor Kepala Desa Roburan Lombang 2019

## B. Kondisi Geografi dan Demografi Desa

### 1. Letak Desa Roburan Lombang

Letak Desa Roburan Lombang Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Parbangunan, Saba Jior.

Sebelah Selatan : Desa Roburan Dolok.

Sebelah Barat : Desa Roburan Dolok, Lumban Dolok

Sebelah Timut : Desa Aek Ngali, Lumban Dolok, Kayulaut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Roburan Lombang juga berada di hulu sungai Aek Roburan.

Posisi ini menjadikan desa ini sangat strategis dalam menjaga daerah aliran sungai (DAS) Aek Roburan. Selain itu desa Roburan Lombang berdampingan dengan rimba larangan yang dibuat pada masa kerajaan. jarak dari pusat pemerintahan 2 km, dan jarak dari ibu kota Kabupaten 16 km, sedangkan jarak dari ibu kota provinsi  $\pm 500$  km.

### 2. Topografi dan Jenis Tanah

Desa Roburan Lombang terletak pada ketinggian 700 meter diatas permukaan air laut. Topografi tanah berupa lereng dan punggung bukit.

Jenis tanah umumnya lempung berpasir dan sebagian rawa.

### 3. Iklim

Kelembaban rata-rata  $27^0-30^0C$  serta curah hujan cukup tinggi mencapai 3000-3500 mm/tahun dan termasuk beriklim tropis.

### 4. Luas Wilayah

Luas wialayah Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal adalah 25.375 Ha yang terdiri dari:

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah**

No	Penggunaan Lahan	Jumlah Ha
1	Persawahan/tegalan/perladangan	162 Ha
2	Pemukiman	40 Ha
3	Perkebunan/Hutan Rakyat	6500 m <sup>2</sup>
4	Perikanan	10 tambak
5	Hutan Milik Negara	42,58
6	Pendidikan	3 unit
7	Perkantoran	1 unit
8	Lapangan	1unit
9	Pemakaman	2 unit
10	Tempat Peribadatan	1 unit
11	Hutan Rimba	100 Ha

Sumber Data primer *Kantor Kepala Desa Roburan Lombang 2019*



## Keadaan Sosial

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berjumlah 2.194 jiwa dengan kepala keluarga terdiri dari 455 KK, sedangkan laki-laki berjumlah 988 orang, dan perempuan berjumlah 1206 orang.

### 2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/Km sebagai catatan,  $1 \text{ Km}^2 = 100 \text{ Ha}$  atau  $1 \text{ Ha} = 1/100 \text{ km}$ . Luas desa Roburan Lombang adalah 23.375 Ha.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-15	275	338	613
2	16-55	691	829	1.520
3	>55	22	39	61
Jumlah		988	1206	2.194

Sumber Data Primer Kantor Kepala Desa Roburan Lombang 2019

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk golongan umur 16-55 adalah yang terbesar yakni 1520 jiwa, sedangkan yang kecil adalah penduduk golongan umur >55 yakni sebesar 61 jiwa.

### 3. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama, seluruh masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal 100% menganut agama Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Komposisi Penduduk Menurut Suku

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku, seluruh masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal adalah 100% suku Mandailing.

## 5. Komposisi Penduduk Tingkat Pendidikan

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD, SLTP, SLTA, dan sebagian yang mengenyam perguruan tinggi dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	353
2	SMP/SLTP	400
3	SMA/SLTA	300
4	Akademi/D1-D3-S1	100
Jumlah		1.153

Sumber Data Primer *Kantor Kepala Desa Roburan Lembang* 2019

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan terbesar adalah lulusan pendidikan SLTP sebesar 400 jiwa, dan yang terkecil adalah Akademi/D1-D3-S1, sebesar 100 jiwa.

## 6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian

Sedangkan komposisi penduduk desa Roburan Lombang menurut mata pencaharian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	25
2	Pedagang	20
3	Petani	350
4	Pertukangan	15
5	Buruh Tani	65
6	Peternak	20
7	Lain-lain	222

Sumber Data Primer *Kantor Kepala Desa Roburan Lumbang* 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah mata pencaharian terbesar adalah petani sebesar 350 jiwa, dan yang terkecil adalah pertukangan 15 jiwa. Untuk kondisi perumahan penduduk sekitar, sebahagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa non permanent dan sebahagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir, dewasa/berumah tangga, meninggal), seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga.

Kegotong royongan masyarakat juga masih kuat, kebiasaan menjenguk orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa tetapi mereka menyalurkan uang ketika hendak pulang untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan masih juga dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih sangat kuat.

#### D. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Roburan Lombang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata

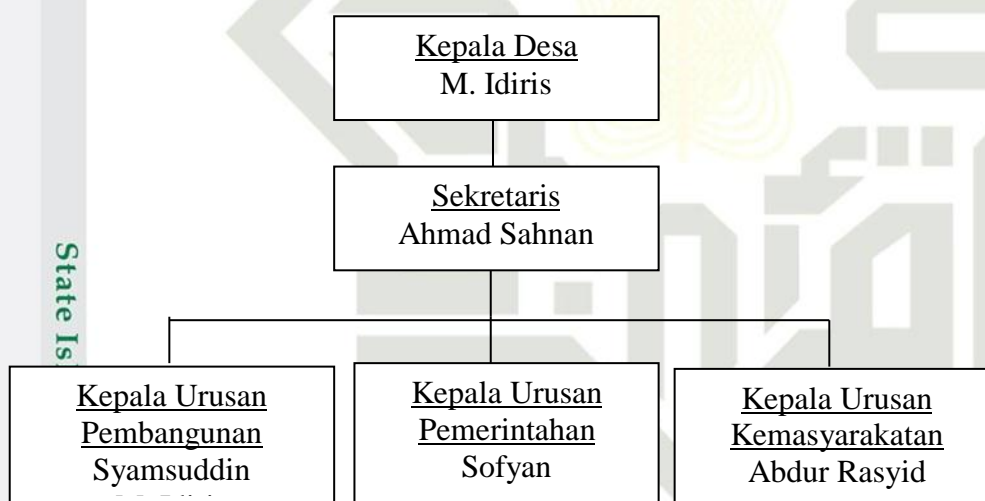


pencahariannya disektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet, dan palawijaya dan sebagian kecil disektor formal seperti Honorer, PNS dan lain-lain.

## 2. Struktur Pemerintahan Desa

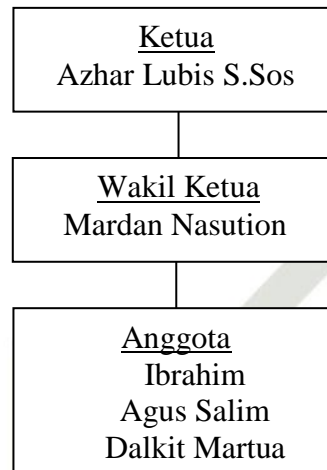
Wilayah di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal tidak dibagi kedalam beberapa dusun. Desa Roburan Lombang hanya Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

**Gambar I.1**  
**Struktur Perangkat Desa Roburan Lombang**  
**Kabupaten Mandailing Natal**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar I.2**  
**Struktur Badan Perwakilan Desa Roburan Lombang**  
**Kabupaten Mandailing Natal**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### 1. Pengertian Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>20</sup>

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.<sup>21</sup>

Menurut Sugiyurso dan F. Winarni menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administrasi dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III, h. 1250

<sup>21</sup>Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 373

<sup>22</sup>Sugiyurso, G. dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005, p. 95



Sifat gaji pada umumnya menurut Hartadi adalah :

- a. Berlaku secara nasional,
- b. Dikeluarkan oleh pemerintah pusat,
- c. Biasanya ditinjau 5 tahun sekali,
- d. Ada sistem kenaikan dengan jumlah perincian dari pusat pemerintahan,
- e. Dasar pemberian adalah golongan/ tingkat pekerjaan, dan
- f. Diikuti dengan sistem tunjangan.<sup>23</sup>

Selanjutnya pengupahan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah:

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan dikutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut:

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

<sup>23</sup>Hartadi, Bambang, *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*, Yogyakarta: BPFE, 1999, h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Upah minimum;
  - b. Upah kerja lembur;
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. denda dan potongan upah;
  - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- 4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Masih dalam Pasal 88 pada ayat (4) ditentukan bahwa “Pemerintah menetapkan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.” Dalam penetapan Upah Minimum tersebut sesuai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), dibagi menjadi dua yaitu (a). Berdasarkan wilayah Propinsi atau kabupaten/kota, (b). Berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau kabupaten/kota yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Sedangkan untuk penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) “Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota.” Ayat (4) “Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri.”

Pasal 92 ayat (1) : “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja pendidikan dan kompetensi.” Ayat (2): “Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”. Ayat (3) : “Ketentuan mengenai struktur dan skala upah diatur dengan Keputusan Menteri”.

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan (penulis dalam hal ini menyebutnya sebagai kaum buruh). Sehingga dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruanglingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.



Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Perbedaan yang ada adalah point kelayakan yang lebih ditekankan sebagai aspek pencipta interaksi kerja yang harmonis. Bila kita melihat teori upah menurut konsep barat yang ungkapkan oleh Hendry Tanjung. Maka akan diketahui bahwa konsep barat lebih terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Berbeda halnya dengan gaji yang menurut pengertian barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali.

Pemilik tenaga kerja dalam hal ini adalah pekerja atau karyawan. Sedangkan pengguna tenaga kerja adalah pengusaha. tentang tenaga kerja, Supardi menjelaskan definisi pemilik tenaga kerja, pengguna tenaga kerja, gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka pekerja harian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa buruh atau pekerja memiliki hak jaminan sosial sebagai berikut;

- 1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 100 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan bahwa; 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- 2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
- 3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah, dan perintah menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>24</sup>

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>25</sup>

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

## B. Pengertian Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iyadh*, artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Menurut MA.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h. 56

<sup>26</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 168



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tihami, *Al-Ijarah*, (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut Rachmat Safi'I *ijarah* secara bahasa adalah: بيع المنفعة (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa menyewa.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Akan untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

2. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاثُفِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

<sup>27</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Asy-Syafi'iyah, ijarah adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَّعْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

*Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.*

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adakah:

تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

*pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.*

5. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفْعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ

فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

*Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.*

7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>28</sup>

*Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr.

<sup>28</sup>Ibid, 168

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah: menjual manfaat dan upah-mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah: menjual tenaga atau kekuatan.<sup>30</sup>

### C. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum *ijarah* atau rujukan adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-ijma'.

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. 1, Cet. 1, h. 247

<sup>30</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Loc. Cit.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ أَرْضَعْنِ لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”*

(Al-Talaq: 6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari wanita itu berkata: *“Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya* (Al-Qashash: 26).

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

*“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْافِى مِنَ الزَّرْعِ فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص م ذَلِكَ

وَأَمَرَ نَابِذَهُبٍ أَوْوَرَقٍ (رواه احمد وابوداود)

*“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami dengan cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”* (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Landasan *ijma*'nya ialah semua ummat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 117

## D. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. *Ijarah* yang seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.<sup>32</sup>

## E. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah

<sup>32</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), Cet. 1, h. 84

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>33</sup>

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka”.* (An-Nisa: 29).

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Sighat* ijab Kabul antara *mu’jirdan musta’jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upah mengupah misalnya: seseorang berkata: “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00 kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
3. *Ijarah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 117



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:<sup>34</sup>

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan diisyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>35</sup>

Syarat sah atau tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya

<sup>34</sup>Ibid, 117-118

<sup>35</sup>Ibid, 118

harus juga ditetapkan. Dari Ibnu Mas'ud bersabda: *“apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajir (pekerja), maka hendaknya diberi tahu tentang upahnya”*.

2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.
3. Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya perjanjian tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.
4. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Said *“bahwa Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya menjadi jelas bagi ajir tersebut”*.

Upah dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>36</sup>

## 1. Sistem Pembayaran Upah

Metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sitem pembayaran upah adalah:

### 1. Sistem Upah Menurut Waktu

Dalam beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerjaan yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kualitas dan karyawan terus-menerus terlibat dalam proses pekerjaan maka sistem upah waktu lebih tepat digunakan.

Pembayaran upah dapat dilakukan dimuka atau dibelakang (bekerja dulu baru upah kemudian). Administrasi upah sangat sederhana tidak banyak perhitungan. Bagi perusahaan industri sistem ini sangat menyulitkan dalam kalkulasi harga pokok sebab akan timbul kesulitan dalam menghitung biaya yang ekonomis rasional, yaitu biaya yang sebenarnya dibebankan ke dalam produksi.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Prenada Media Group, 2008), Ed. 1, Cet. 2, h. 229-230

<sup>37</sup>Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 1988), h. 176-177



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Upah Sistem Hasil (*Output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas ketentuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.<sup>38</sup>

#### 3. Sistem Upah Prestasi, Potongan

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau perunit produk yang diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan

- a. Adanya dorongan bekerja lebih giat.
- b. Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi.
- c. Perhitungan harga pokok akan lebih baik.

Sebaliknya ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini membahayakan kehidupan keluarganya.
- b. Buruh mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Akibatnya peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan, karena bekerja kurang hati-hati.

#### 4. Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang ia lakukan telah memberikan keuntungan kepada karyawan.

<sup>38</sup>Vethzal Rivai, *Islamic Human Capital dari teori ke praktek Manajemen Sumber Daya Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 799

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem upah premi ini mempunyai keuntungan sebagai berikut:

- a. Bagi manajemen
  - a) Biaya dapat ditekan sebagai hasil pertambahan produktivitas.
  - b) Memperbaiki perimbangan biaya dan produksi, dan perhitungan biaya makin konsisten.
  - c) Meningkatkan daya guna fasilitas yang ada.
  - d) Meningkatkan moral pekerja, karena upah yang ia terima sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan.
- b. Bagi Karyawan
  - a) Ada kesempatan untuk memperoleh upah yang lebih tinggi.
  - b) Dia merasa mendapat pengakuan atau penghargaan dari perusahaan.
  - c) Ada persaingan sehat diantara para pekerja, sehingga timbul semangat kerja tinggi.
  - d) Memberi kesempatan untuk meningkatkan standar hidup dengan inisiatif sendiri.

#### 5. Sistem Upah Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.<sup>39</sup>

Sitem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan

<sup>39</sup>Buchari Alma, *Loc. Cit*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.

#### 6. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti ke kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

#### 7. Sistem Skala Upah Berubah

Dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi dipasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun upahpun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

#### 8. Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks kebutuhan biaya hidup, dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

#### 9. Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir tahun.<sup>40</sup>

### G. Penutupan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak

<sup>40</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Sasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 92-93



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak (ingat kasus pembunuhan terhadap tenaga kerja wanita yang bernama Marsinah).

Persoalan itu timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha (pemberi pekerjaan) yang terkadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.<sup>41</sup>

Menyangkut penentuan upah kerja, Syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran”.*(QS. An-Nahl (16): 90).

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu, dapat diartikan “tenaga kerja” , sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan

<sup>41</sup>suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), Cet, 1. h. 167

kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.<sup>42</sup>

Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan maka berkewajiban majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah berbuat keji (seperti memaksa pekerja berbuat cabul) dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah.

Disamping itu, Rasulullah juga memberikan ancaman. Beliau mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugatnya di hari akhir kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomi Sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dalam Ahmad Ashar Basyir, 1993: 194),

*“Bahwa ajir khas pembantu rumah tangga, yang berada dibawah kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang makan oleh keluarga rumah tangga, diberi pakaian seperti pakaian yang dipakai keluarga rumah tangganya, jangan diberi pekerjaan di luar kekuatan wajar. Jika dibebani pekerjaan hendaklah dibantu untuk meringankan.”*<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 3, h. 157

<sup>43</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. 2, h. 155-156

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ketentuan hadis tersebut tidak dikemukakan mengenai tempat tinggalnya. Hal itu tentunya dimaklumi, sebab pembantu rumah tangga selalu bertempat tinggal di rumah keluarga tempat bekerjanya.

Kalau ketentuan hadis tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja pada umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan si majikan kepada si pekerja, haruslah dapat memenuhi:

1. Kebutuhan pangan si pekerja
2. Kebutuhan sandang
3. Kebutuhan tempat tinggalnya

Apabila pekerja tersebut kepala keluarga, tentunya masuk kebutuhan anggota keluarganya. Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi pekerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.<sup>44</sup>

#### H. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri,

<sup>44</sup>*Ibid*, 156



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai diselesaikan
2. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali jika dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijarah*-kan mengalir semua penyewaan berlangsung.<sup>45</sup>

### I. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti salat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk salat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW bersabda:

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“Bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan yang itu”.

وَإِنْ اتَّخَذْتَ مُؤَدِّنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْ الْأَذَانِ أَجْرًا

“Jika kamu mengangkat seseorang jadi *mu'adzin*, maka janganlah kamu pungut dari azan itu satu upah”.

<sup>45</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.121

Perbuatan seperti azan, qomat, shalat, puasa, haiji, membaca Al-Quran, dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian secara selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Al-Qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembaca ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:

*“Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan”* (AL-Baqarah: 286)

Dijelaskan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersisa untuk mengajarkan Al-Qur'an.<sup>46</sup>

Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, qomat, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk *taqorrub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'I dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan mengajarkan bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Malik berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan badal haji. Imam Syafi'I berpendapat, bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, *khat*, bahasa,

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 118-120



sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Iman Abu Hanifah berpendapat, bahwa pengambilan upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.

Aplikasinya dimasyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat dielakkan lagi, karakteristik kehidupan manusia pada zaman ini sangat memerlukan adanya upah, sekalipun dalam masalah ibadah.<sup>47</sup>

## J. Upah Menurut Islam

Penentuan upah dalam islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan.

### 1. Makna Adil Dalam Pengupahan

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh sederhana sikap adil adalah menyesuaikan harga dengan biaya produksi (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah), menyesuaikan upah dengan jenis pekerjaan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op Cit.* h. 171-172

<sup>48</sup> Nurnasrina, *Perbankan syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, kosep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertakwa.<sup>49</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>50</sup>

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dan Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Veithzal Rivai, *Op. Cit*, h. 802

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Al ma'arif, 2005), h.99

<sup>51</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h.118

Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terlatak pada kejelasan akad (transaksi dan komitmen melakukannya). Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Dalam menjelaskan hadis itu, Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Disamping itu adil dapat bermakna proporsional, hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keadilan dan pengalaman.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>52</sup>veithzal Rivai, *Op. cit*, h. 804



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Al-Ahqaf ayat 19)

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka. Karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menantang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, majikan mungkin mendapat keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik para pekerja maupun majikan.<sup>53</sup>

#### 2. Makna Layak Dalam Pengupahan

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan kepentingan-kepentingan pekerja

<sup>53</sup> Muhammad Fauroni dan R. Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 175

maupun majikan. Para buruh harus mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar haknya. Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan, serta layak bermakna sesuai dengan pasaran. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas dari pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lain.

Dalam uraian upah menurut konsep Islam di atas, maka dapat dijelaskan bagaimana konsep upah dalam Islam. Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat. Untuk menerapkan konsep upah dalam dimensi duni, maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting. Jika moral diabaikan, dimensi moral tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan paling luar karena konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi upah dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan manajemen upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syari'ah dalam pengupahan karyawannya diperusahaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Makna Kebajikan Dalam Pengupahan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua beah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak menjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lain di Negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Mirnawati, *Analisis Upah Buruh Tani Padi Di Desa Pulau Bayur Kecamatab Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, skripsi, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), h. 45-46, t.d.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis upah buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Ekonomi Islam maka dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal adalah Sistem Upah berdasarkan Hasil apabila buruh mendapatkan 10 kaleng padi maka setiap buruh mendapatkan 1 kaleng padi dan pemilik lahan mendapatkan 9 kaleng padi. Sedangkan upah harian buruh panen padi sebesar Rp 50.000.
2. Menurut tinjauan ekonomi Islam upah buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal sebagian sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu dalam kebajikan dalam pengupahan. Sementara dalam keadilan dan kelayakan dalam pengupahan buruh panen padi belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam.

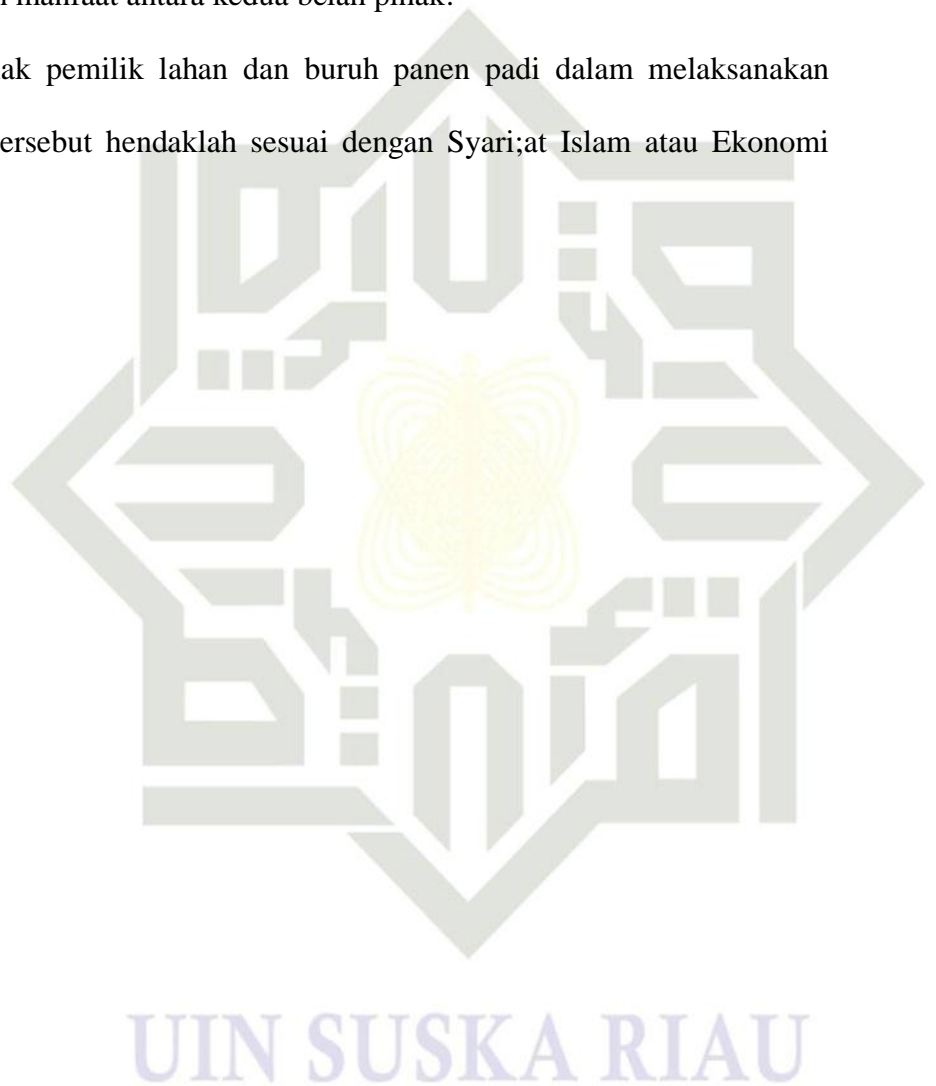
#### B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan buruh panen padi yang terjadi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Kepada pemilik lahan hendaknya memperhatikan lagi hak-hak buruh panen padi, untuk itu diharapkan kepada pihak pemilik lahan dalam pemberian upah hendaklah tepat pada waktunya dan upah yang diberikan tersebut juga sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh panen padi, serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.
  2. Kepada pihak pemilik lahan dan buruh panen padi dalam melaksanakan kerjasama tersebut hendaklah sesuai dengan Syariat Islam atau Ekonomi Islam.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KEPUSTAKAAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, 1994, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdulrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo, Cet. 1
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah, (Hukum Perdata islam)*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008, *Manajemen Syariah*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada
- Afzalul Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, Jiid. 2
- \_\_\_\_\_, 1997, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, Cet. Ke-3
- Asri Wijayanti, 2010, *hukum ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bank Indonesia, Kondifikasi Produk Perbankan Syariah
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, 1998, Bandung: CV Alfabeta
- Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, Edisi Kedua, Cet. Ke-5
- Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah
- Departemen Pendidikan, 2005, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Edi Sutrisno, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hattah Mamang Sangdji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian*, Malang : Penerbit Andi  
 Hattah Rahman Djamil, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2  
 Hartadi, Bambang, 1999, *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*, Yogyakarta: BPFE  
 Helmi Karim, 1993, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada  
 Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada  
 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1995, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995, Jilid 2  
 Ibnu Prabowo, 2016, *Upah Buruh Harian Lepas Menurut Perpekstif Ekonomi Islam*, Skripsi, Pekanbaru: Perpustakaan Uin Suska Riau  
 Idri, 2015, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1  
 Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif (Teoridan Praktek)*, Jakarta : Bumi Aksara Cet. 1, Ed. 1  
 Juhaya S.Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, Cet. Ke-5  
 Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 1  
 Mirnawati, 2015, *Analisis Upah Buruh Tani Padi Di Desa Pulau Bayur Kecamatab Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, skripsi, Pekanbaru: UIN Suska Riau  
 Muhammad Syafi'I Antonio, 2011, *Bank syariah*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1  
 \_\_\_\_\_, 2011, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1  
 Muhammad Fauroni dan R. Lukman, 2002, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah,  
 Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Salemba Empat  
 M. D. Unaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogyakarta: Ar-Ruzz Me  
 Nurnasrina, 2012, *Perbankan syariah*, Pekanbaru: Suska Press  
 Nurul Huda, dkk, 2008, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- achmat Syafei, 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- \_\_\_\_\_, 2004, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2
- ayid Sabiq, 2006, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pundi Askara, jilid. 4
- ugiyarso, G. dan Winarni, F, 2005, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Media Pressindo
- ugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet, 1
- Sohar Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Vethzal Rivai, 2009, *Islamic Human Capital dari teori ke praktek Manajemen Sumber Daya Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Veithzal Rivai dan Adi Buchari, 2013, *Islamic Econimics* Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi, Jakarta: Bumi Askara, Cet. Ke-2
- Zainal Asikin, 2008, *Dasar-Sasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zaen Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja*, Mataram: PT. Raja Grafindo

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ANGKET**

**ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN  
LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

**A. Petunjuk Pengisian Angket**

1. Angket ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang ibu/bapak lakukan.
2. Berikan tanda ( X ) atau silang pada pilihan A,B yang sesuai dengan keinginan bapak/ibu.
3. Terima kasih kepada bapak/ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan bapak/ibu. Amin

**B. Data Responden**

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :

**C. Angket**

1. Apakah ada perjanjian pembayaran upah sebelum panen padi?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
2. Kapan pemilik lahan memberikan upah buruh panen padi?
  - a. Setelah panen selesai
  - b. Setelah pemilik menjual hasil panen



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

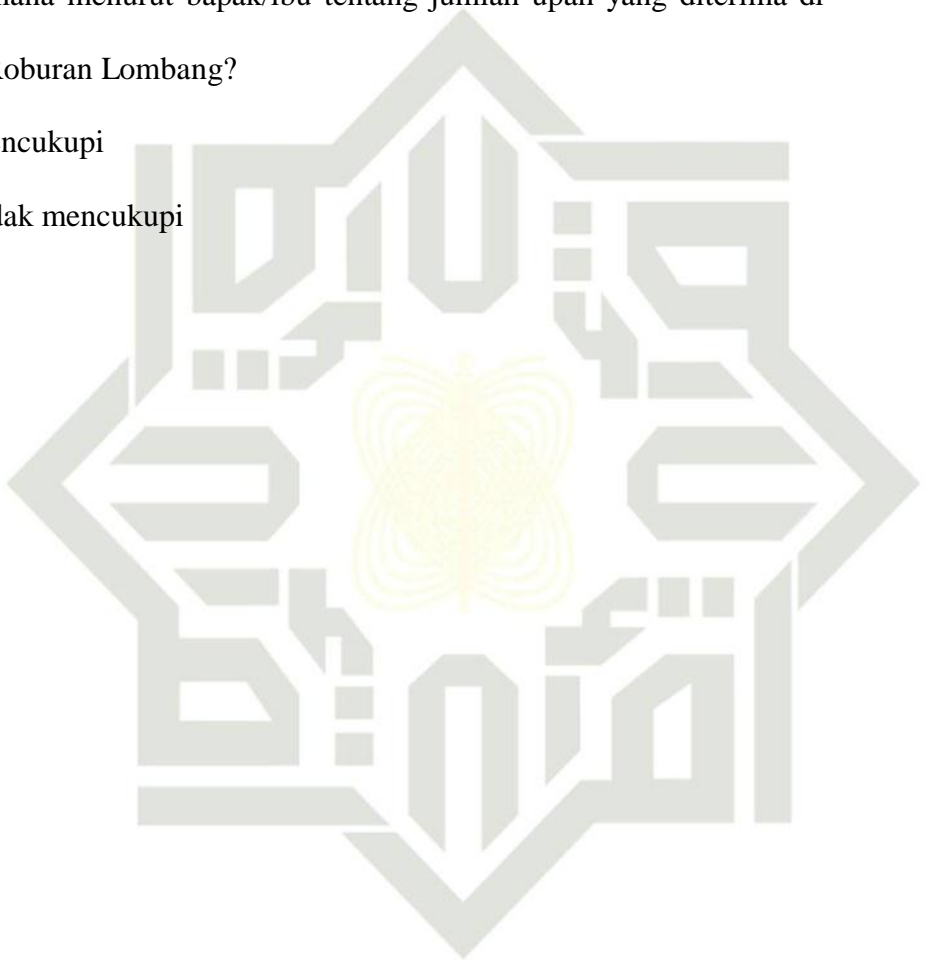
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

3. Bagaimana sistem upah buruh panen padi yang diterima?
  - a. Perhari
  - b. Berdasarkan hasil panen yang didapatkan
4. Berapa kaleng upah yang didapatkan buruh panen padi pada masa panen padi?
  - a. 10 kaleng
  - b. 9 kaleng
  - c. 8 kaleng
  - d. 7 kaleng
5. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja pada masa panen padi?
  - a. 10 hari
  - b. 9 hari
  - c. 8 hari
  - d. 7 hari
6. Bagaimana ketepatan waktu pembayaran upah buruh panen padi yang ditetapkan di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Tepat waktu
  - b. Tidak tepat waktu
7. Apakah pemilik lahan pernah menaikkan jumlah upah untuk buruh panen padi?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
8. Apakah pernah terjadi pemotongan upah oleh pemilik lahan?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai jasa yang diberikan dengan upah yang didapatkan?
  - a. Sesuai
  - b. Tidak sesuai
10. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang jumlah upah yang diterima di Desa Roburan Lombang?
  - a. Mencukupi
  - b. Tidak mencukupi



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pemilik Lahan

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Roburan Lombang?
2. Kapan pembayaran upah panen padi?
3. Apakah ada batas waktu dalam panen padi?

### B. Buruh Panen Padi

1. Apakah upah yang diberikan tepat waktu?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu jasa yang diberikan sesuai dengan upah yang didapatkan?
3. Apakah upah yang Bapak/Ibu terima mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan upah yang diberikan oleh pemilik lahan?
5. Apakah ada batas waktu dalam panen padi?
6. Apakah pemilik lahan pernah menaikkan upah?
7. Apakah pernah terjadi pemotongan upah yang dilakukan oleh pemilik lahan?

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi Saat Panen Padi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Abdurrahim (Pemilik Lahan)**



**Wawancara dengan Ibu Sakdiah (Pemilik Lahan)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Amsar (Buruh Panen Padi)



Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Buruh Panen Padi)





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA  
ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT  
EKONOMI ISLAM" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yakub

NIM : 11525101532

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu, 04 Desember 2019  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak

Sekretaris  
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I  
Drs. Arifuddin, MA

Penguji II  
Nur Hasanah, S.E, MM

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM  
NIP. 19680226 199103 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD YAKUB**

NIM : **11525101532**

Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**

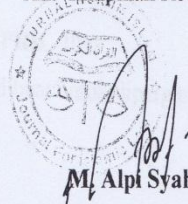
Judul : **ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA  
ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING  
NATAL MENURUT EKONOMI ISLAM**

Pembimbing : **Ahmad Hamdalah, ME. Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 198804302019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PQ, Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4133/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD YAKUB  
N I M : 11525101532  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 15 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 9 Mei 2019

Dekan  
  
DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan  
Lombang Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Ekonomi Islam ditulis oleh  
saudara :

Nama : Muhammad Yakub

NIM : 11525101532

Program Studi : Ekonomi Syariah

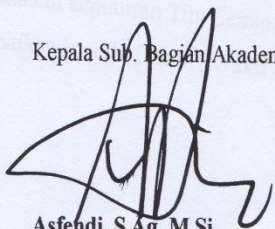
Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 29 Maret 2019

Narasumber : Rustam, SE.ME.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik



Asfendi, S.Ag, M.Si  
NIP.19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 4 April 2019  
Narasumber



Rustam, SE, ME, Sy  
NIK.130 217 133

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

## BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. N A M A                           | : Muhammad Yakub   |
| 2. NOMOR MAHASISWA                   | : 11525101532  |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN             | : Analisis upah buruh tani panen padi didesa roburan lamabng kabupaten mandaliang natal ditinjau menurut ekonomi islam |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan            | : Jum'at / 29 Maret 2019   |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah : |  |
| a. Judul                             | : Disetujui / <del>Ditolak</del> / Disempurnakan   |
| b. Latar Belakang Masalah            | : <del>Jelas / Masih Kabur</del> / Perlu Perbaikan   |
| c. Permasalahan                      | : <del>Jelas / Masih Kabur</del> / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas   |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian    | : Jelas / <del>Mengambang</del> / Perlu Perbaikan  |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada)      | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan   |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada)      | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam   |
| g. Metode Penelitian                 | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan  |
| h. Daftar Pustaka                    | : Cukup / <del>Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti</del>   |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Rustam, SE, ME.Sy

### Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I



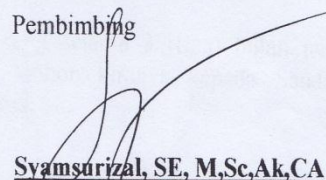
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN KELOMPOK

Nama : Muhammad Yakub  
Nim : 11525101532  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian Kelompok : “Analisis Manajemen Resiko Dalam Pendistribusian Pada Usaha Roti Bobo Di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”

Pekanbaru, 9 Oktober 2018

Pembimbing

  
Syamsurizal, SE, M,Sc,Ak,CA  
Nip 198012162009121002





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4024/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Mei 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD YAKUB  
NIM : 11525101532  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal  
ditinjau Menurut Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22439  
TENTANG



182010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kapala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4024/2019 Tanggal 2 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : MUHAMMAD YAKUB
2. NIM / KTP : 11525101532
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : SUMATERA UTARA
6. Judul Penelitian : ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
7. Lokasi Penelitian : DESA ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara  
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 1298 /BKB.P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/224639 Tanggal 3 Mei 2019 Perihal Rekomendasi penelitian.

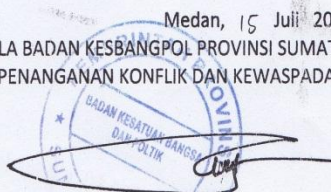
## MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Muhammad Yakub
- b.Alamat : Pekanbaru
- c.Pekerjaan : Mahasiswa
- d.Nip/Nim/KTP : 11525101532
- e.Judul : Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam
- f.Lokasi/Daerah : Kabupaten Mandailing Natal
- g.Lamanya : 3 (tiga) bulan
- h.Peserta : Sendiri
- i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
  - a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.
  - b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
  - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 3 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 15 Juli 2019

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



BUDIANTO TAMBUNAN,SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640526 199803 1 002

## Tembusan :

- 1.Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
- 2.Bupati Mandailing Natal Up Ka Badan Kesbangpol
- 3.Ka. Balitbang Provsu
- 4.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5.Pertinggal





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Muhammad Yakub**, lahir di Roburan Lombang pada tanggal 24 April 1997. Penulis merupakan anak ke lima dari pasangan Bapak Suhaimi dan Ibu Amnah Riwayat Pendidikan formal yang telah di tempuh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 144453 Roburan Lombang tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama pada SMP Kayu Laut tamat tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas pada MAN Panyabungan tamat tahun 2015. Melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2014-2019.

Masa perkuliahan penulis melaksanakan pengabdian pada masyarakat di Desa Koto Tuo Barat Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Penulis melakukan penelitian dengan judul *Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam*. Pada tanggal 26 November 2019 penulis dinyatakan lulus pada Munaqasyah dalam sidang ujian Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.